

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan /pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

2. Kedudukan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Kpts/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Kerja Sama Luar Negeri merupakan salah satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal melaksanakan fungsi manajemen pendukung pembangunan pertanian dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sedangkan Biro Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian khususnya pada aspek manajemen kerja sama luar negeri di bidang Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.
2. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.
3. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian.
4. Penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri
5. Pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja sama Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Susunan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Bagian Bilateral
- (2) Bagian Regional
- (3) Bagian Multilateral
- (4) Bagian Pengelolaan dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian;

Bagian Bilateral memiliki 3 Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik;
2. Sub Bidang Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa;
3. Sub Bidang Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Bagian Regional memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan ASEAN;
2. Sub Bagian Non-ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan Non-ASEAN;
3. Sub Bagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan Intra Kawasan.

Bagian Multilateral memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pangan, pertanian dan lingkungan;
2. Sub Bagian Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah;

3. Sub Bagian Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah;

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri dibidang pertanian;
2. Sub Bagian Administrasi Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian;
3. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggal Biro Kerja Sama Luar Negeri

3. Visi dan Misi

Visi Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

Misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif.
2. Menyusun rumusan kebijakan kerja sama luar negeriyang mendukung Strategi Induk pembangunan pertanian nasional.
3. Menyusun program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
4. Meningkatkan peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Mendiseminasikan hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Memantau dan mengevaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.

7. Melaksanakan fungsi pelayanan organisasi yang prima.

2. Tujuan

Tujuan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri periode tahun 2015 -2019, sebagai berikut :

1. Untuk menunjang tugas pertanian dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional serta untuk mendorong meningkatnya ekspor produk pertanian.
2. Untuk menunjang perjuangan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia melalui forum bilateral, regional dan multilateral.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian baik petani ataupun birokrat dengan memanfaatkan peluang kerja sama dibidang pendidikan dan latihan dengan negara mitra baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral.
4. Meningkatkan kerjasama bidang pertanian melalui pertemuan / sidang-sidang untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan para petani baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral.
5. Menggali dan memanfaatkan peluang kerja sama melalui kerangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral untuk peningkatan kerja sama internasional bidang pertanian dalam rangka peningkatan kerja sama teknik maupun kerja sama perdagangan dan investasi sektor pertanian.
6. Menunjang diplomasi politik melalui pertanian dalam rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menyediakan data dan analisis yang mendukung kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan yang terkait dengan kerja sama luar negeri bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit laporan keuangan dan audit kinerja birokrasi.

3. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif .
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung *Strategi Induk* pembangunan pertanian.
3. Tersusunnya program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
4. Terwujudnya peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri selama Bulan Maret 2016, dapat dilaporkan sebagai berikut :

2.1. Bidang Bilateral

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Pertemuan Bilateral Indonesia-Belgia tanggal 15 Maret 2016 di Kementerian Pertanian Jakarta
2. Filed Visit Delegasi Mesir, tanggal 16 Maret 2016 di Badan Karantina Pertanian Jakarta
3. Pertemuan *the 7th Joint Agricultural Working Group (JAWG)* Indonesia – Thailand, tanggal 23-24 Maret 2016 di Thailand

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Bilateral

1. Koordinasi Persiapan Kunjungan Tim Teknis Kementan RI ke Hongaria, tanggal 29 Pebruari – 2 Maret 2015 di Makasar Sulawesi Selatan
2. Rapat Pertemuan ke-7 *Joint Agricultural Working Group (JAWG)* Indonesia – Thailand, tanggal 18 Maret 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta
3. Rapat Pendahuluan Penyusunan Buku Pemetaan Produksi, Konsumsi dan Distribusi Komoditi Hortikultura Internasional, tanggal 18-19 Maret 2016 di BB Biogen Bogor
4. Koordinasi penyusunan data produksi, konsumsi dan distribusi komoditi hortikultura di Sumatera Utara, tanggal 22-24 Maret 2016 di Medan Sumatera Utara

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Menghadiri *Focus Group Discussion (FGD)* Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Singapura, tanggal 2 Maret 2016 di Bogor
2. Menghadiri rapat Sub Komite Perdagangan Barang dalam rangka Persiapan *Special Meeting of Sub Committee Trade in Goods IJEPA*, tanggal 4 Maret 2016 di Kementerian Perdagangan
3. Menghadiri Forum Debriefing Kepala Perwakilan RI, tanggal 8 Maret 2016 di Hotel Lumire Jakarta
4. Menghadiri rapat persiapan penerimaan Delegasi Mesir, tanggal 10 Maret 2016 di Badan Karantina Pertanian Jakarta

5. Menghadiri Pembahasan perkembangan Red Meat and Cattle Forum dalam kerangka kerja sama IA – CEPA, tanggal 31 Maret 2016 di BKPM Jakarta

2.2. Bidang Regional

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Regional

1. Rapat Persiapan Kunjungan US-ASEAN *Business Council* (US-ABC) tanggal 1 Maret 2016 di Ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Jakarta
2. Persiapan “*Asian Food and Agribusiness Conference: Strengthening Public–Private-Sector Partnerships for Sustainable, Competitive Agribusinesses*”, pada tanggal 28-30 Maret 2016 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat, tanggal 8 Maret 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta.
3. Persiapan “*Asian Food and Agribusiness Conference: Strengthening Public–Private-Sector Partnerships for Sustainable, Competitive Agribusinesses*”, pada tanggal 28-30 Maret 2016 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat. Tanggal 14-15 Maret 2016 di Bandung Jawa Barat

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Rapat Persiapan *The 67th Meeting of ASEAN Coordinating Committee on Investment* (CCI), tanggal 3 Maret 2016 di BKPM Jakarta

2.3. Bidang Multilateral

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Multilateral

1. Rapat Persiapan “*Meeting of the OECD Committee for Agricultural at Ministerial Level*”, tanggal 2 Maret 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta
2. Rapat *FAO Country Work Plan Indonesia 2016-2017*, tanggal 11 Maret 2016 di Hotel Sahira Bogor
3. *Kick Off Meeting* Finalisasi COSOP – IFAD 2016-2019, tanggal 15 Maret 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta
4. Rapat Pembahasan COSOP-IFAD 2016-2019, tanggal 16 Maret 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta
5. Rapat Koordinasi Tim Perizinan Ormas Asing, tanggal 17 Maret 2016 di Bogor Jawa Barat

6. Pemaparan dari Universitas Hasanuddin, tanggal 17 Maret 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta.
7. Penyusunan Draft MSP Kerja Sama antara Kemtan dengan IDH International Trade Initiative, tanggal 18-19 Maret 2016 di Bogor Jawa Barat
8. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan COSOP-IFAD 2016-2019, tanggal 21-22 Maret 2016 di Balivet Bogor Jawa Barat
9. Rapat persiapan EB IFAD ke-117, tanggal 22 Maret 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta
10. *Wrap Up Meeting* Finalisasi COSOP – IFAD 2016-2019, tanggal 24 Maret 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta.
11. Rapat penyusunan bahan EB IFAD ke-117, tanggal 31 Maret – 1 April 2016 di BB Biogen

Menghadiri Undangan Rapat, Seminar, Lokakarya dan lain-lain

1. Menghadiri Koordinasi Kerjasama IRRI, tanggal 1 Maret 2016 di IRRI Bogor Jawa Barat
2. Menghadiri *Policy Dialogue*: "Rejim Kebijakan Impor Ayam dan Daging Ayam Nasional dan Gugatan Sengketa di WTO, tanggal 3-4 Maret 2016 di Bandung Jawa Barat
3. Menghadiri rapat pengajuan proposal proyek dan calon anggota PSPS – CFC, tanggal 18 Maret 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta

2.4 Bagian Pengelolaan PHLN dan Atase Pertanian

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Penyebaran Informasi Peluang Kerja Sama Luar Negeri tanggal 1 – 3 Maret 2016 di Denpasar Bali

Menghadiri Undangan Rapat, Seminar, Lokakarya dan lain-lain

1. Menghadiri Sosialisasi Peraturan Mentan No. 06/Permentan/KU.060/2/2016, tanggal 1 Maret 2016 di Hotel Santika Depok
2. Menghadiri Konsolidasi dan Rekomendasi PNBK Kementan TA 2015 dan Pembahasan Draft Awal Pelaksanaan Kerja Sama PNBK, tanggal 1-2 Maret 2016 di Bogor Jawa Barat
3. Menghadiri Persiapan pelaksanaan workshop Aplikasi Monev (SMART) OMK 249/2011 Tahun 2011, tanggal 15 Maret 2016 di Bogor Jawa Barat
4. Menghadiri *Wrap up Meeting Seventh Implementation Support Mission SMARTD (7th ISM) on Sustainable Management Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD- LOAN No. 8188-ID)* tanggal 18 Maret 2015
5. Menghadiri Koordinasi tindak lanjut (Action Plan) Hasil Review LK/BMN dan Bimtek Mekanisme Pengelolaan Aset/BMN, tanggal 21-23 Maret 2016 di Bogor Jawa Barat
6. Menghadiri Rapat Pembahasan Perubahan Target Penarikan Pinjaman dan Hibah Dalam Rangka Penyusunan RAPBNP 2016, tanggal 29 Maret 2016 di Kementerian Keuangan Jakarta.

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

- 1 Penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 74 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 5 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 37 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 15 orang, melakukan kunjungan sebanyak 16 orang dan program S2 sebanyak 1 orang.

LAPORAN BULANAN BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

PERIODE BULAN MARET 2016

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT	KEGIATAN	PIHAL YANG TERLIBAT	HASIL KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
BAGIAN BILATERAL					
1.	29 Pebruari – 2 Maret 2016. Makassar, Sulawesi Selatan.	Koordinasi Persiapan Kunjungan Tim Teknis Kementan RI ke Hongaria.	Biro KLN dan Balitsereal Maros, Sulawesi Selatan.	<p>Adapun hasil kunjungan kami ke Balitsereal pada tanggal 29 Pebruari – 2 Maret 2016 yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan kami diterima oleh Kepala Balai Penelitian Serealia, Bapak Dr. Taufik Ratule beserta staf di Kantor Balitsereal Maros. Pada pertemuan tersebut, Kepala Balai menjelaskan beberapa kegiatan dan fasilitas yang dimiliki oleh Balitsereal serta persiapan keikutsertaan delegasi dari Balitsereal; 2. Setelah melakukan diskusi dengan Kepala Balitesereal, kami melanjutkan observasi lapangan dan diskusi dengan beberapa staf peneliti di Balitsereal. Berdasarkan diskusi tersebut, beberapa informasi penting yang kami peroleh yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Balitsereal memiliki Laboratorium Biologi Molekuler sebagai fasilitas riset pangan. Laboratorium yang dilengkapi fasilitas canggih HiScan SQ sangat menunjang dalam menganalisis genome tanaman sebagai dasar dalam melakukan seleksi/persilangan. Teknologi biologi molekuler sangat berperan dalam membantu menyeleksi calon varietas yang mempunyai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balitsereal fokus pada pengembangan komoditi sereal seperti jagung, sorgum, dan gandum. Disamping pengembangan budidaya serealia sebagai sentra produksi jagung di Provinsi Sulawesi Selatan, Balitsereal juga melakukan inovasi baru dalam pemanfaatan hasil produksi serealia menjadi produk yang berdaya guna seperti etanol, gula basah, kue cair, dan silase. 2. Mengacu kepada aktifitas penelitian yang dilakukan di Balitsereal, perlu disusun kerja sama yang perlu diusulkan kepada pihak Hongaria. Diharapkan melalui kombinasi teknologi yang dimiliki oleh kedua negara dapat meningkatkan produksi komoditi gandum dan pengolahan komoditi serealia yang dilakukan di Balitsereal.

				<p>adaptasi terhadap iklim ekstrim atau untuk menunjang ketahanan pangan seperti jagung kaya vitamin dan mineral. Badan Litbang Pertanian saat ini telah melepas jagung hibrida kaya protein yaitu Bima 12Q dan Bima 13Q. Sementara itu jagung kaya vitamin A yang telah dilepas adalah hibrida Provit A.</p> <p>b. Balitsereal juga memiliki gudang UPBS Badan Litbang yang telah menerapkan system manajemen mutu dalam pengelolaan benih sumber.</p> <p>c. Balitsereal juga telah mampu membuat etanol dari sorgum manis (nira sorgum) serta pemanfaatan etanol untuk memasak jagung ketan Uri. Balitsereal juga mampu menciptakan kompor etanol yang mampu memasak 10 jam nonstop dengan bahan bakar 1 liter etanol (kadar 94%). Etanol yang didestilasi pada kadar 98% bahkan dapat digunakan untuk substitusi Pertamina yang saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil.</p> <p>d. Disamping pengolahan etanol dari nira sorgum, Balitsereal juga melakukan beberapa inovasi seperti pembuatan gula cair untuk bahan baku kecap dan kue basah, pemanfaatan biji sorgum yang digiling menjadi tepung sebagai bahan pembuatan kue kering, serta pembuatan silase dari batang sorgum yang telah diperas niranya.</p> <p>e. Kami juga meninjau konsep pertanian perkotaan yang memperagakan model KRPL seperti walkaponik, vertical garden, VUB aneka kacang-kacangan serta tanaman rempah dan obat. Lokasi strata ini</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>diintegrasikan dengan system penyiraman otomatis menggunakan irigasi tetes dan sprinkler.</p> <p>3. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra produksi untuk komoditi jagung. Untuk meningkatkan produksi jagung di Sulawesi Selatan diperlukan peran aktif dari Balitsereal dalam melakukan penelitian dan inovasi baru. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil jagung utama di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung. Produksi jagung Sulsel juga ditargetkan naik minimal 10%. Berdasarkan data BPS, produksi jagung Sulawesi Selatan pada tahun 2014 mencapai 1,6 juta ton. Pada tahun 2015 ini, produksi jagung Sulsel diharapkan naik menjadi 1,8 – 1,9 juta ton atau 10% dari produksi jagung nasional.</p> <p>4. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 13 Provinsi yang dilakukan untuk pengembangan gandum yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bengkulu, Sulsel, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Pengembangan gandum di Sulawesi Selatan difokuskan di wilayah Malino dengan kelembaban udara yang tinggi. Pada kondisi wilayah tersebut, benih gandum mudah untuk berkecambah dan berjamur sehingga mempengaruhi kualitas hasil biji. Produksi gandum di wilayah Malino rata-rata mencapai 1,3-2,4 t/ha.</p>	
2.	2 Maret 2016, Bogor	Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Singapura	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian,	1. FGD ini bertujuan untuk menyusun bisnis model kerja sama Indonesia dengan Singapura dan sebagai bahan pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang	

			<p>Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan</p>	<p>Perekonomian RI dengan Menteri Perdagangan Singapura, pada tanggal 8 Maret 2016 di Jakarta.</p> <p>2. Terdapat beberapa pertemuan yaitu: i) <i>Senior Official Meeting</i> tanggal 21 April 2016 di Bali ii) <i>Ministerial Meeting</i> untuk 6 <i>Working Group (WG)</i> dan <i>Working Group (WG) on Financial</i> tanggal 30 Mei 2016 di Singapura, dan iii) <i>Leaders Retreat</i> pada bulan Juni 2016.</p> <p>3. Dalam FGD ini dipaparkan mengenai bagaimana cara meningkatkan kerja sama ekonomi dan bisnis Indonesia – Singapura dan <i>Overview</i> perkembangan kerja sama ekonomi Indonesia – Singapura.</p> <p>4. Dalam kerja sama ekonomi kedua negara hanya memiliki satu format yaitu pertemuan 6 <i>Working Group (WG)</i> yang dibentuk pada tahun 2010 di Singapura dan <i>WG on Financial</i>. Ke-6 WG tersebut yaitu: i) WG Kerja Sama Batam Bintan Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lainnya; ii) WG Investasi; iii) WG Transportasi, iv) WG Ketenagakerjaan; v) WG Pariwisata, dan vi) WG Agribisnis. Adapun yang menjadi <i>focal point</i> kerja sama ekonomi tersebut yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>5. Singapura merupakan investor paling besar di Indonesia, namun perekonomian di negara Singapura itu sendiri didominasi oleh <i>Multinational Corporation</i> sehingga dapat dijadikan sasaran sebagai investor di Indonesia. Adapun daerah yang akan difokuskan dalam investasi Singapura yaitu</p>
--	--	--	--	--

				<p>Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Hal ini disebabkan oleh lokasi BBK yang sangat strategis dengan Singapura dan tenaga kerja lebih murah. Namun hambatan investasi di BBK diantaranya yaitu adanya dualisme kewenangan di Batam dan demo buruh yang menghambat proses produksi di Batam.</p> <p>6. Terkait dengan WG Agribisnis, WG ini dibentuk untuk meningkatkan ekspor buah dan sayur dengan target 20% dari kuota pasar buah dan sayur di Singapura yang diberikan kepada Indonesia. Namun sampai saat ini target tersebut belum dapat dioptimalkan oleh Indonesia.</p> <p>7. Pertemuan AWG terakhir (ke-11) telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2015 di Makassar dan telah disepakati bahwa AWG akan dilaksanakan 1 tahun sekali, baik di Indonesia ataupun di Singapura. Pertemuan AWG ke-12 akan dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Agustus di Singapura.</p> <p>8. Adapun yang menjadi kendala dalam kerja sama di bidang pertanian Indonesia – Singapura yaitu masalah kargo udara yang relatif mahal sehingga produk-produk pertanian Indonesia masih kalah bersaing dengan negara lain. Selain itu harga produk pertanian di dalam negeri lebih mahal dibandingkan pasar Singapura sehingga petani lebih tertarik menjual produknya di dalam negeri.</p> <p>9. Kementerian Pertanian telah memetakan produksi buah dan sayuran Indonesia yang diminati Singapura serta pembagian komoditi untuk ekspor ke Singapura dengan fokus di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Jawa Tengah, dan Jawa Timur.</p> <p>10. Saat ini terdapat beberapa perusahaan daging olahan unggas Indonesia (berupa nugget, karage, sosis ayam) yang berminat untuk masuk ke pasar Singapura yang mendapat sambutan positif dari Singapura. Calon eksportir Indonesia sedang proses melengkapi dokumen agar dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan yang diperlukan.</p>	
3.	4 Maret 2016, Kementerian Perdagangan	Rapat Sub Komite Perdagangan Barang dalam rangka Persiapan <i>Special Meeting of Sub Committee Trade in Goods</i> IJEPA	Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenprin, Kementan, Kementerian KP, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perdagangan.	<p>1. Dalam kerangka <i>General Review</i> IJEPA akan dilaksanakan <i>Special Meeting of Sub Committee Trade in Goods Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement</i> (IJEPA), pada tanggal 10 – 11 Maret 2016 di Jepang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan negosiasi akses pasar barang dalam kategori R dan Q.</p> <p>2. Pada pertemuan <i>Special Session</i> tersebut, pihak Indonesia akan meminta pihak Jepang untuk menurunkan tariff bea masuk untuk produk kategori R lebih rendah dibanding negara ASEAN lainnya, serta penambahan kuota ekspor produk Q.</p> <p>3. Saat ini pihak Indonesia telah mengklasifikasikan produk kategori R dan Q berdasarkan nilai perdagangan. Pengklasifikasian produk tersebut terbagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelompok 1: pengelompokkannya berdasarkan jumlah ekspor Indonesia ke Jepang dan Jepang impor dari dunia dalam lima tahun terakhir. Kelompok 2: pengelompokkannya dilihat dari posisi Indonesia tidak ekspor ke Jepang, namun Jepang impor dari dunia. Kelompok 3: pengelompokkannya 	

				<p>berdasarkan tidak adanya ekspor Indonesia ke Jepang dan tidak ada impor Jepang dari dunia.</p> <p>4. Perwakilan dari Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa posisi terkait pertanian masih mengusulkan penambahan kuota ekspor pisang dan nanas ke Jepang untuk produk yang masuk dalam kategori Q. Penambahan kuota tersebut sebanyak 10.000 ton/tahun dalam kerangka IJEPA. Selama ini kuota yang diterapkan dalam kerangka IJEPA adalah sebanyak 1000 ton.</p>	
4.	8 Maret 2016 Hotel Lumire Jakarta	Forum Debriefing Perwakilan RI	Kepala Komisi I DPR RI Perwakilan dari seluruh Kementarian terkait BIN BKPM Kadin	<p>1. Forum <i>Debriefing</i> ini mengangkat tema pasca Peringatan KAA ke-60. Forum ini menghadirkan 4 Narasumber yaitu: Harbangan Napitupulu (Dubes LBBP RI untuk Mozambique), Agustinus Sumartono (Dubes LBBP RI untuk Namibia merangkap Angola), Andrajati (Dubes LBBP RI untuk Senegal merangkap Pantai Gading, Gambia, Guinea Bissau, Gabon, Kongo, Guinea, Mali dan Sierra Leone) dan Teuku Rezasyah (Dosen HI Unpad).</p> <p>2. Forum dibuka oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu.</p> <p>3. Dalam pembukaannya beliau menyampaikan beberapa hal diantaranya: Benua Afrika adalah benua masa depan yang memiliki kekayaan alam melimpah, sebagai kawasan yang strategis dan memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada periode 2011-2012 rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasan Afrika mencapai 5%, dua kali lipat lebih besar dari pertumbuhan ekonomi dunia saat itu. Sehingga kita perlu merubah mindset tentang Afrika yang menganggap terbelakang serta mendorong pengusaha Indonesia untuk</p>	Meningkatkan kerjasama pertanian RI-Afrika melalui forum Bilateral seperti halnya JWC RI-Namibia atau JACC RI-Tanzania dan lain sebagainya. Indonesia dapat belajar dari <i>best practices</i> Tiongkok yang mencerminkan kesatuan gerak dan langkah para <i>stakeholders</i> mereka dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan Afrika.

				<p>berinvestasi di Afrika sebab bisa jadi Afrika adalah Benua masa depan Industri Indonesia.</p> <p>4. Beberapa rangkuman paparan para Dubes LBBP RI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya cetak biru politik luar negeri RI untuk membangun kesamaan persepsi Indonesia terhadap kawasan Afrika. Persepsi Indonesia, khususnya kalangan pengusaha, terhadap kawasan Afrika masih cenderung negatif. - Diperlukan sosialisasi hasil kajian BPPK terkait potensi ekonomi Afrika kepada para <i>stakeholders</i> di dalam negeri," - Perlu peningkatan kehadiran Indonesia di kawasan melalui di antaranya pemanfaatan Indonesia sebagai <i>observer</i> dalam Uni Afrika. Selain itu disarankan perlunya meningkatkan kerja sama antar Indonesia dengan organisasi-organisasi sub kawasan di Afrika yakni SADC di Selatan, ECOWAS di Barat dan EAS di Timur. - Indonesia memiliki keunggulan <i>soft power</i> berupa pendidikan dan <i>interfaith dialogue</i> dapat digunakan sebagai alternatif pintu masuk bagi peningkatan pengaruh Indonesia di kawasan Afrika 	
5.	10 Maret 2016 Badan Karantina Pertanian	Rapat persiapan penerimaan Delegasi Mesir	Kepala pengelola portal INSW, Biro KLN dan Badan Karantina	<p>1. Direncanakan pada tanggal 13 sd. 18 Maret 2016 , 14 orang Delegasi Mesir akan berkunjung ke Indonesia.</p> <p>2. Delegasi tersebut dipimpin oleh General Eng. Atef Ibrahim El-Feki, Deputy Minister for Information Technology (setingkat Eselon I) dari Kementerian Keuangan Mesir. Anggota Delegasi terdiri dari beberapa Kementerian diantaranya; Kementerian Keuangan,</p>	KLN akan mendukung suksesnya kunjungan tersebut dan direncanakan akan ikut mendampingi pelaksanaan kunjungan tersebut.

				<p>Perdagangan dan Industri, Transportasi dan Kementerian Pertanian.</p> <p>3. Adapun kunjungan ke Kementerian Pertanian direncanakan akan diadakan pada tanggal 16 Maret 2016 ke Kantor Badan Karantina Pertanian. Direncanakan kunjungan tersebut akan diterima Kepala Badan Karantina Pertanian kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke BBKP Soekarno Hatta. Tujuan utama kunjungan ke Kementan adalah dalam rangka melihat penerapan sistem single window Indonesia.</p> <p>4. Saat ini Mesir sedang berusaha ingin memasukan jeruknya melalui Tanjung Priok namun karena belum terbebas dari penyakit lalat buah dan belum mendapat recognisi pest free area, sehingga jeruk tersebut belum boleh masuk melalui tanjung priuk. Selain alasan tersebut saat ini Kementan sementara melakukan perbaikan insprastruktur di tanjung priuk serta sistem perkarantinaan. Namun yang tak kalah penting juga alasan Kementan tidak memasukan melalui tanjung priuk adalah untuk melindungi buah local Indonesia.</p>	
6.	15 Maret 2016. Kantor Kementerian Pertanian RI.	Pertemuan Bilateral Indonesia-Belgia.	Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Badan Karantina Pertanian	<p>1. Misi Dagang Belgia, yang dipimpin oleh <i>Her Royal Highness Princess Astrid</i>, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 13-19 Maret 2016. Sebagai bagian dari kegiatan misi dagang ini, delegasi Belgia yang dipimpin oleh <i>Ms. Vicky Lefevre, Director General of Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC-FAVV)</i> melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Inovasi dan Teknologi Pertanian, pada tanggal 15 Maret 2016 di Kantor Kementerian Pertanian RI. Ketua Delri didampingi oleh Kepala Biro Kerja</p>	Masing-masing unit eselon I Kementerian Pertanian segera menindaklanjuti hasil kesepakatan.

				<p>Sama Luar Negeri, Direktur Kesehatan dan Masyarakat Veteriner, wakil Ditjen Perkebunan, wakil Ditjen Hortikultura dan wakil Badan Karantina Pertanian.</p> <p>2. Pada pertemuan tersebut, Ketua Delri menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada Delegasi Misi Dagang Belgia yang telah berkunjung ke Indonesia guna meningkatkan kerja sama di sektor pertanian dan menjajaki kemungkinan-kemungkinan kerjasama baru.</p> <p>3. Pertemuan berhasil menyepakati poin-poin penting terkait peningkatan akses pasar komoditas unggulan masing-masing negara seperti perluasan ekspor susu dan buah-buahan dari Belgia ke Indonesia, dan ekspor kelapa sawit dan kakao dari Indonesia ke Belgia. Hal ini didukung dengan pertukaran informasi terkait regulasi terkini seperti prosedur verifikasi produk peternakan dan produk hortikultura ke Indonesia, serta regulasi penerapan satu kebijakan, baik aspek standard dan keamanan pangan maupun distribusi, oleh Uni Eropa dimana Belgia merupakan salah satu anggotanya.</p> <p>4. Dalam rangka membangun citra positif dunia internasional tentang tanaman sawit di Indonesia, telah dijelaskan pula sekilas tentang <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> untuk meyakinkan pihak Belgia bahwa produksi sawit di Indonesia telah mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan (<i>sustainability</i>).</p> <p>5. Rangkaian kunjungan resmi Misi Dagang Belgia terkait sektor pertanian diakhiri dengan Seminar '<i>Sustainable Agriculture Toward Bio-Based</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>Economy Cases for Belgo-Indonesian Cooperation</i>' pada tanggal 16 Maret 2015 di IPB International Convention Center Bogor. Seminar ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional, baik pemerintah, swasta dan lembaga internasional non pemerintah, serta berhasil menelurkan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan sumber energi alternatif ramah lingkungan dan berkelanjutan, pengembangan pertanian berwawasan lingkungan, dan peningkatan kapasitas manajerial rantai pasok pangan untuk menjamin keamanan pangan yang terintegrasi secara utuh.</p> <p>6. Pada kesempatan ini, Menteri Pertanian diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Teknologi Pertanian menyampaikan pandangan umum terkait tantangan dunia dalam menjamin tercapainya ketahanan pangan yang berlandaskan azas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Peran aktif Kementerian Pertanian dalam menjamin ketersediaan pangan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui kebijakan Upaya Khusus (UPSUS) yang digalakkan oleh Menteri Pertanian mendapat sambutan positif dari seluruh pemangku kepentingan nasional dan internasional.</p>	
7.	16 Maret 2016 Badan Karantina Pertanian	Filed Visit Delegasi Mesir	Kepala pengelola portal INSW, Biro KLN dan Badan Karantina Pertanian	<p>1. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan bapak Dr. Ir. Arifin Tasrif.</p> <p>2. Dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh Delegasi Mesir. Beliau juga menyampaikan bahwa pertemuan ini mudah-mudahan dapat menjadi membuka peluang kerjasama RI-Mesir lebih meningkat dari sebelumnya.</p>	

				<p>3. Delegasi Mesir berjumlah 14 Orang terdiri dari perwakilan dari pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Industri, Kementerian Transportasi, Kementerian Pertanian dan Perwakilan dari Kedutaan Mesir di Jakarta. Dalam sambutannya ketua Delegasi Mesir Mr. Atef Ibrahim El-Feki menyampaikan beberapa hal :</p> <p>4. Ucapan terimakasih atas sambutan dan waktunya telah menerima Delegasi</p> <p>5. Indonesia – Mesir telah lama menjalin kerjasama antara kedua Negara dan kedatangan Delegasi saat ini dalam rangka menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Mesir khususnya terkait dengan perkarantinaan dan ekspor impor.</p> <p>6. Pihak Mesir mengusulkan sekiranya ada sebuah wadah berupa working group khusus terkait perkarantinaan guna membahas tentang regulasi, sistem maupun teknologi perkarantinaan.</p> <p>7. Pada Pertemuan ini Barantan menyampaikan dua materi presentasi yaitu tentang Sistem perkarantinaan dan profil Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian.</p> <p>8. Untuk selanjutnya Delegasi melakukan filedtrip ke Bandara Soekarno Hatta untuk meninjau lokasi Instalasi Karantina Hewan dan Instalasi Karantina Tumbuhan.</p>	
8.	18 Maret 2016, Biro KLN Kementerian Pertanian	Rapat Pertemuan ke-7 <i>Joint Agricultural Working Group (JAWG)</i> Indonesia - Thailand	Biro KLN, Badan Litbang Pertanian, BKP, Ditjen Prasarana dan Sarana	1. Pertemuan ke-7 <i>Joint Agricultural Working Group (JAWG)</i> Indonesia – Thailand akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2016 di	

			<p>Pertanian, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dan Kementerian Luar Negeri</p>	<p><i>the Ocean Marina Yacht Club, City of Pattaya, Chon Buri Province, Thailand.</i> Adapun yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.</p> <p>2. Pertemuan akan membahas kemajuan implementasi 28 proyek kegiatan yang telah disepakati kedua negara pada pertemuan-pertemuan JAWG sebelumnya, yang terdiri dari 16 proyek kegiatan usulan dari Thailand dan 12 proyek kegiatan usulan dari pihak Indonesia.</p> <p>3. Terkait dengan usulan baru yang akan dibahas pada pertemuan ke-7 ini, pihak Thailand telah menyampaikan 9 usulan baru disertai dengan proposalnya, sementara Indonesia baru menyampaikan 3 usulan baru kegiatan.</p> <p>4. Diharapkan dalam pertemuan JAWG ke-7 ini pihak Indonesia dapat memberikan posisi terhadap proposal-proposal kegiatan yang diusulkan oleh pihak Thailand, sesuai dengan masukan dari instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian.</p>	
9.	18-19 Maret 2016. BB Biogen Bogor	Rapat Pendahuluan Penyusunan Buku Pemetaan Produksi, Konsumsi dan Distribusi Komoditi Hortikultura Internasional	<p>Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan serta penanggungjawab kegiatan dari Biro KLN.</p>	<p>Rapat pendahuluan penyusunan Buku Pemetaan Produkssi, Konsumsi dan Distribusi Komoditi Hortikultura Internasional bertujuan untuk:</p> <p>1. Merumuskan outline Buku. Pada pertemuan tersebut menghasilkan outline buku mencakup: a) upaya peningkatan produksi dan produktifitas hortikultura yang berdaya saing, b) pemetaan produksi, konsumsi, distribusi komoditi hortikultura di Indonesia dan negara mitra, c) peluang kerja sama konkret dengan mitra untuk komoditi hortikultura berdasarkan data base komoditi hortikultura.</p> <p>2. Perlu dipertimbangkan untuk pengkajiannya</p>	<p>1. Outline buku mencakup: 1) upaya peningkatan produksi dan produktifitas hortikultura yang berdaya saing, 2) pemetaan produksi, konsumsi, distribusi komoditi hortikultura di Indonesia dan negara mitra, 3) peluang kerja sama konkret dengan mitra untuk komoditi hortikultura berdasarkan data base komoditi hortikultura.</p> <p>2. Biro KLN secepatnya menetapkan prioritas negara yang akan dikaji untuk</p>

				dilakukan berdasarkan komoditi atau negara. Penentuan main commodity pada masing-masing negara yang dikaji menjadi variabel penting yang harus dilakukan dalam penyusunan buku tersebut.	disampaikan kepada konsultan. Kemudian pihak konsultan akan menentukan komoditi yang akan dikaji pada masing-masing negara prioritas dimaksud.
10.	22-24 Maret 2016. Sumatera Utara	Koordinasi penyusunan data produksi, konsumsi dan distribusi komoditi hortikultura di Sumatera Utara	Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, BPTP Badan Litbang Pertanian Sumatera Utara, dan Badan Karantina Pertanian	Hasil koordinasi dengan beberapa instansi terkait di Sumatera Utara yaitu: 1. Penyelesaian permasalahan penyediaan bibit bawang merah murah dan berkualitas utk petani, 2. Permasalahan penyakit kriting pada cabe (yg sampai dengan saat ini belum ada satupun varietas cabe yg tahan hama tsb), serta Permasalahan lalat buah pada jeruk medan (atau disebut dgn jeruk siam).	Permasalah-permasalahan tersebut akan dijadikan sebagai bahan kerjasama teknis (penelitian) yang dapat kita usulkan kepada negara-negara mitra, sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi.
11.	23-24 Maret 2016, Thailand	Pertemuan <i>the 7th Joint Agricultural Working Group (JAWG) Indonesia – Thailand</i>	Sekretaris Jenderal, Biro KLN, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Luar Negeri, KBRI di Bangkok, <i>Ministry of Agriculture and Cooperatives Thailand</i>	1. Pertemuan membahas 28 kegiatan yang telah disepakati dalam pertemuan-pertemuan JAWG sebelumnya, yang terdiri dari 16 proyek kegiatan usulan dari Thailand dan 12 proyek kegiatan usulan dari pihak Indonesia. 2. Dalam pertemuan JAWG ke-7 ini telah disepakati bahwa dari 28 kegiatan dimaksud terdiri atas 11 proyek kegiatan dari kedua belah pihak telah selesai dilaksanakan, 6 proyek kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, dan 11 proyek kegiatan telah dibatalkan. Adapun ke-6 proyek kegiatan yang akan ditindaklanjuti pada periode 2016-2017 yaitu: <i>i) Training on Foot and Mouth Disease</i> <i>ii) Integrated Pest Management and Post-Harvest Treatment on Mango and Mangosteen</i> <i>iii) Technical Cooperation on Highly Pathogenic Avian Influenza Control to Facilitate Trade of Zebra Dove between Thailand and Indonesia</i> <i>iv) Cervical and Laparoscopic Artificial Insemination</i>	Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan pertemuan <i>the 8th Joint Agricultural Working Group (JAWG) between Indonesia and Thailand</i> pada tahun 2018 di Indonesia.

				<p><i>in Goats</i></p> <p>v) <i>Study Visit on Improving for Technical and Management Skills of Rice and Soybean Seed Grower</i></p> <p>vi) <i>Agricultural Extension Training Course in Kasetsart University Bangkok, Thailand.</i></p> <p>3. Sedangkan kegiatan yang baru diusulkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam pertemuan ini yaitu 7 usulan kegiatan dari 9 usulan yang disampaikan oleh pihak Thailand, dan 1 usulan kegiatan dari 4 usulan yang disampaikan oleh pihak Indonesia.</p> <p>4. Adapun ke tujuh usulan dari pihak Thailand, yaitu:</p> <p>i) <i>Use of biochar on the rehabilitation of degraded soil and for climate-friendly</i></p> <p>ii) <i>Exchange knowledge and technology on tropical soil classification to manage soil and fertilizer efficiency</i></p> <p>iii) <i>Sugarcane research and development for high yield and sucrose production</i></p> <p>iv) <i>Developing cultural practice techniques and postharvest & processing skill to increase productivity of the 3 major crops (coconut, cocoa and coffee) in climate change period</i></p> <p>v) <i>Exchange knowledge and experience for joint project development on on-farm water management</i></p> <p>vi) <i>Thailand-Indonesia knowledge exchange on rice production management</i></p> <p>vii) <i>Cooperation in promotion and development of coffee production, processing, and marketing.</i></p> <p>5. Sedangkan ke empat usulan dari pihak</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Indonesia, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) <i>Exchange Information on Integrated Farming Management on Consolidated Land in Thailand</i> ii) <i>Comparative Study on Good Agricultural Practices (GAP) for Vegetables</i> iii) <i>Study on Bio ethanol derived from Cassava</i> iv) <i>Study Comparative on food supply chain in Thailand.</i> <p>Terkait dengan usulan kegiatan dari pihak Indonesia point ii), iii), dan iv), diharapkan dapat segera melengkapi TOR atau <i>Project Digest</i>.</p>	
12.	31 Maret 2016 BKPM	Pembahasan perkembangan Red Meat and Cattle Forum dalam kerangka kerja sama IA – CEPA	Rapat pembahasan dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan rapat menjelaskan bahwa dalam rangka perundingan IA – CEPA yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Pada struktur perjanjian IA – CEPA terdapat beberapa overlap yang harus diluruskan seperti Red Meat and Cattle Partnership yang dimasukkan ke dalam investasi. Selain itu kerja sama Indo beef yang dipisahkan dengan Red Meat and Cattle Partnership padahal masih dalam satu bidang yaitu peternakan. 2. Kerjasama Indonesia – Australia dalam kerangka Red Meat and Cattle Partnership ini diawali dengan harmonisasi hubungan kedua kepala negara setelah sempat tidak harmonis karena alasan politis. Kedua kepala negara pada saat itu yakni presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kevin Rudd bertemu dan menghasilkan Joint Declaration. Australia pada saat itu siap membantu Indonesia sebesar 60 Juta Australian Dollar untuk membantu investasi dalam bidang peternakan dalam bentuk capacity building dan research untuk menunjang food security. 	

				3. Draft awal Red Meat and Cattle Partnership ini disusun oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Bappenas. Sehingga apabila ada perubahan terhadap draft ini wewenangnya ada pada Bappenas dan Kementerian Lembaga terkait.	
BAGIAN REGIONAL					
1.	1 Maret 2016, Ruang Sekjen Kementan	Rapat Persiapan Kunjungan US-ASEAN <i>Business Council</i> (US-ABC)	Sekjen, Biro KLN dan Dubes Michael W Michalak (US-ABC)	<p>1. Dubes Michael W Michalak menyampaikan permohonan dukungan Kementerian Pertanian untuk kunjungan Misi Industri Pangan dan Pertanian Amerika Serikat ke Indonesia, yang direncanakan pada tanggal 31 Maret 2016.</p> <p>2. Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan US-ABC dengan delegasi Indonesia disela-sela pertemuan AMAF ke-37 pada bulan September 2015, di Philippines.</p> <p>3. Tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk memahami prioritas kebijakan pertanian Indonesia dan menjajaki berbagai peluang untuk meningkatkan investasi swasta Amerika Serikat di sektor pertanian di Indonesia.</p>	Sekjen akan melaporkan kepada Mentan terkait kunjungan dari Misi US-ABC tersebut.
2.	3 Maret 2016 RR. Pekanbaru, BKPM	Rapat Persiapan <i>The 67th Meeting of ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI)</i>	Kemenlu, Kemendag, Setkab, Kementerian ESDM dan Biro KLN	Beberapa isu yang dibahas pada pertemuan ke-67 ini, yakni (i). <i>ASEAN-US shared Principles on International Investment</i> ; (ii). <i>ACIA Built-in Agenda</i> ; (iii). <i>Investment Liberalisation</i> ; (iv). <i>Peer Review and Transparency</i> ; (v). <i>Investment Promotion, Facilitation and Protection</i> ; (vi). <i>CCI Work Programme</i> ; (vii). <i>OECD's Proposed Concept Note on "Fostering Regional Investment Policy Reform in ASEAN</i> ;	Pada agenda <i>Peer Riview and Transparency</i> , AMS diminta untuk melaporkan kebijakan/ peraturan yang baru terkait penanaman modal, yang dikeluarkan sejak tahun 2014 hingga 2015, termasuk diantaranya Daftar Negatif Investasi (DNI), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peraturan sektoral, dan kebijakan lainnya. Dalam hal ini posisi Indonesia masih tetap sama seperti pertemuan CCI ke-66

					sebelumnya sampai dikeluarkannya DNI resmi terbaru setelah RAKORTAS oleh Kemenko Perekonomian.
3.	8 Maret 2016, Biro KLN, Kementan	Persiapan “ <i>Asian Food and Agribusiness Conference: Strengthening Public–Private-Sector Partnerships for Sustainable, Competitive Agribusinesses</i> ”, pada tanggal 28-30 Maret 2016 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat.	perwakilan dari Direktorat Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja; Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian; Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta; dan panitia yang termasuk dalam SK Kepanitiaan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait <i>tentative program</i> tersebut, kami mengusulkan agar <i>opening remarks</i> dan <i>welcome address</i> disampaikan sekaligus oleh Direktur Produktivitas (NPO), Kementerian Tenaga Kerja; 2. NPO sepakat bahwa <i>opening remarks</i> dan <i>welcome address</i> disampaikan sekaligus oleh Direktur Produktivitas (NPO), Kementerian Tenaga Kerja Ditjen Imigrasi, menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang memerlukan Peserta yang membutuhkan VKSK diantaranya Bangladesh, India, dan Inggris, serta Pakistan yang membutuhkan calling visa. Dokumen yang dibutuhkan yaitu copy paspor; 3. Badan Karantina Pertanian juga akan berkoordinasi dengan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta dan Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Bandung; 	Mengirimkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses perijinan; Survey lokasi fieldtrip
4.	14 - 15 Maret 2016, Bandung, Jawa Barat	Persiapan “ <i>Asian Food and Agribusiness Conference: Strengthening Public–Private-Sector Partnerships for Sustainable, Competitive Agribusinesses</i> ”, pada tanggal 28-30 Maret 2016 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat.	Saung Angklung Udjo, kota Bandung; Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu, Parakan Muncang, Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Saung Udjo, para peserta akan disugahi hidangan makan malam khas Jawa Barat, sambil diiringi musik arumba dari kesenian angklung. Para peserta akan melihat demonstrasi wayang golek, demonstrasi upacara khitanan, tari topeng dan bermain angklung bersama. Untuk itu, masing-masing peserta akan mendapat angklung mini; 2. Terkait dengan rencana kunjungan peserta APO pada tanggal 30 Maret 2016, akan melihat secara langsung kebun ubi, bagaimana proses pengolahan, <i>packaging</i>, distribusi dan pemasaran. 	Mengunjungi Saung Udjo dan perkebunan ubi cilembu

BAGIAN MULTILATERAL					
1.	1 Maret 2016/ IRRI, Bogor	Koordinasi Kerjasama IRRI	IRRI dan Biro KLN	<p>1. Biro KLN telah memproses HCA IRRI dan sedang dimintakan tanggapannya dari Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri</p> <p>2. Mr. Matthew K Morell sebagai Direktur Jenderal IRRI yang baru menyampaikan harapannya untuk melakukan <i>Courtesy Call</i> dengan Bapak Menteri Pertanian pada tanggal 25 April atau 26 April 2016</p> <p>3. IRRI akan melaksanakan <i>The 7th International Hybrid Symposium</i> (IHRS) pada tanggal 12- 14 Oktober 2016 di Bali</p>	<p>Dipantau perkembangan <i>Draft</i> HCA ke Kemenlu. Menunggu persetujuan Menteri untuk <i>Courtesy Call</i></p> <p>Mengadakan rapat lanjutan untuk persiapan teknis Simposium</p>
2.	2 Maret 2016 Biro KLN, Kemtan	Rapat Persiapan "Meeting of the OECD Committee for Agricultural at Ministerial Level	BKP, Badan Litbang, Biro Humas, Biro KLN	Mempersiapkan bahan materi untuk <i>Ministerial Meeting</i> yang akan diselenggarakan tanggal 7-8 April 2016 di Paris	Membuat surat Bapak Sekjen ke Duta Besar Perancis untuk Indonesia yang mengusulkan Kepala Badan Litbang dan Kepala Badan Ketahanan Pangan untuk mengikuti agenda acara dimaksud.
3.	3-4 Maret 2016 Bandung, Jawa Barat	<i>Policy Dialogue</i> : "Rejim Kebijakan Impor Ayam dan Daging Ayam Nasional dan Gugatan Sengketa di WTO"	Kemenko Perekonomian, Kemendag Kemenlu, Kemenag, BSN, MUI Provinsi Jabar, Akademisi serta asosiasi Perunggasan dan Peternak ayam.	Indonesia harus secara konsisten memenuhi aturan WTO, di dalam negeri Indonesia masih perlu membenahi masalah halal, baik bersifat peraturan, teknis dan fasilitas	Pemerintah, dunia usaha dan akademisi perlu bersinergi membangun sistem perdagangan yang mementingkan kepentingan nasional tetapi tidak melanggar aturan internasional
4.	11 Maret 2016 Hotel Sahira, Bogor	Rapat FAO <i>Country Work Plan</i> Indonesia 2016-2017	Sesditjen Perikanan Budidaya dihadiri oleh wakil dari Biro KLN, Kementerian Pertanian, Biro Kerja Sama dan Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro KLN Kementerian Desa dan Asisten FAo Rep	<p>1. Bahwa Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh wakil Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menghadiri <i>Workshop on the Regional Rice Initiative - Phase II</i> (RRI-2) pada tanggal 28-30 Januari 2016 di Bangkok.</p> <p>2. Tujuan workshop ini adalah: - Mereview dan melaporkan pelaksanaan</p>	Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat mempercepat proses penandatanganan MoU Mina Padi yang direncanakan akan ditanda tangani oleh Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

			Jakarta	<p>RRI di Negara peserta (Indonesia, Lao PDR, da. Filipina).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berbagi hasil, pengalaman, dan pelajaran dari pelaksanaan RRI di Negara peserta. - Berkontribusi terhadap pelaksanaan RRI ke depan yang lebih efektif dan peningkatan sistem produksi padi yang berkelanjutan, termasuk kebijakan nasional, <i>Good Farming Practices</i> (GAP), nutrisi, dan kehidupan pedesaan yang berbasis produksi padi di setiap Negara peserta dan kawasan Asia Pasifik selama 2016-2017. <p>3. Dalam sesi Rencana Kerja untuk RRI fase III 2016-2017 wakil Pemri menyampaikan, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian telah menganggarkan USD 6 juta per tahun untuk pengembangan minapadi 4.000 ha mulai TA 2016. - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menganggarkan USD 3 juta di TA. 2016 untuk pengembangan minapadi di 766 ha. Untuk TA. 2017, masih akan dikoordinasikan secara internal. - FAO diharapkan dapat membantu mendanai studi untuk menganalisis rantai nilai hasil produksi beras organik dan ikan di lokasi minapadi Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan total hibah USD 400.000. - Selain itu, FAO diharapkan dapat mendanai pengembangan kurikulum dan pelatihan petani <i>save and grow</i> yang akan dikerjakan oleh FIELD dan VECO dengan total anggaran USD 235.000. - Untuk penandatanganan MoU antaran Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan, FAO diharapkan dapat 	
--	--	--	---------	--	--

				<p>membantu mendorong kedua kementerian untuk mempercepat proses penandatanganan MOU tersebut sehingga kegiatan sinergi minapadi mempunyai payung hukum yang kuat.</p> <p>4. FAO RAP sangat mengapresiasi usulan dari Indonesia karena semua anggaran dari dalam negeri telah dipetakan dan bantuan yang diharapkan dari FAO hanya melengkapi kegiatan yang telah dianggarkan dari APBN. Ini sesuai dengan fungsi bantuan FAO yang diharapkan dapat menjadi pengungkit kegiatan dengan anggaran yang lebih besar.</p> <p>5. Sebagai tindak lanjut dari workshop dimaksud Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan rapat pembahasan FAO <i>Country Work Plan</i> Indonesia 2016-2017 di Bogor pada tanggal 11 Maret 2016.</p> <p>6. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut maka telah disusun FAO <i>Country Work Plan</i> Indonesia 2016-2017, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian yang belum terselesaikan.</p>	
5.	15 Maret 2016 Biro KLN Kementan	<i>Kick Off Meeting</i> Finalisasi COSOP – IFAD 2016-2019	Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat BPPSDMP, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Manager SOLID – Loan 835-ID, Kementerian Pertanian; Direktorat Pinjaman dan Hibah, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tujuan misi finalisasi IFAD 2. Penjelasan draf pertama <i>Discussion Paper</i> COSOP – IFAD Indonesia untuk tahun Tahun 2016 – 2019. 	Masing-masing Kementerian/ Lembaga terkait diminta untuk memberikan masukan/tanggapan terhadap <i>Discussion Paper</i> COSOP Indonesia 2016-2019 yang nantinya akan divalidasi pada bulan April 2016

			Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan; Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Manager CCDP – Loan 880-ID, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Sekretariat Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri; Eselon II lingkup Bappenas, serta <i>Country Director IFAD Indonesia</i> dan <i>COSOP Mission Team IFAD</i> .		
6.	16 Maret 2016 Biro KLN	Rapat Pembahasan COSOP-IFAD 2016-2019	Perwakilan dari IFAD Indonesia dan instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian	1. agenda utama pembahasan <i>first draf Discussion Paper IFAD COSOP</i> yang telah disusun oleh IFAD Indonesia, dengan pokok-pokok hasil pembahasan sebagai berikut a. Pada paragraf 7 tentang Agriculture perlu diupdate data dan informasi terutama yang terkait dengan data statistik pertanian. b. Pada paragraf 15 tentang <i>Key</i>	1. Biro Kerja Sama Luar Negeri telah mengirimkan surat kepada Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian perihal permohonan data statistik pertanian guna memperbaharui data COSOP. 2. <i>Discussion Paper COSOP</i>

				<p><i>Opportunities :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu disesuaikan dengan Renstra Kementerian Pertanian • Usulan untuk menambahkan Program UPSUS • Perwakilan dari BKP menambahkan kalimat : <ul style="list-style-type: none"> - Seperti diketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam Negara mega bio diversitas (<i>United Nation Environment Programme/UNEP</i>). Dengan kekayaan alam yang demikian besar maka dapat digali berbagai potensi untuk sumber pangan - Perlu klarifikasi untuk kalimat "<i>However steady increase of public spending for agriculture has so far not translated into a commensurate increase of production</i>" , dan perlu dilihat kembali akan ditempatkan dibagian mana. <p>c. Paragraf 19. <i>National sector strategies</i>, IFAD diharapkan dapat fokus pada 7 komoditas strategis Kementerian Pertanian (padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan daging)</p> <p>d. Pada tabel 1 - <i>IFAD Investment Projects in 2015</i>, perlu ada penjelasan mengenai <i>Direct and Indirect Beneficiaries</i></p>	<p>diharapkan dapat disampaikan kepada perwakilan IFAD pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 untuk disempurnakan lebih lanjut.</p> <p>Rapat Tindak Lanjut Pembahasan COSOP IFAD tanggal 21-22 Maret 2016 di Bogor</p>
7.	17 Maret 2016 Bogor, Jawa Barat	Rapat Koordinasi Tim Perizinan Ormas Asing	Kemlu, BIN, BAIS, Baintelkam, Kemdagri	Kementerian Pertanian dapat segera menyampaikan draft MSP yang telah dibahas dalam rapat interkem yang diselenggarakan oleh Kemtan pada tanggal 18-19 Maret 2016 kepada Dit. Sosbud OINB dan Pi. Ekososbud untuk dapat segera difinalisasi.	Finalisasi draft MSP IDH pada 18-19 Maret 2016 untuk disampaikan kepada Dit. Sosbud OINB dan Pi. Ekososbud
8.	17 Maret 2016	Pemaparan dari Universitas	Unhas, Ford Foundation,	Untuk Tahun 2016/2017 dan 2017/2018, UNHAS	Menindaklanjuti hasil rapat dengan

	Biro KLN, Kemtan	Hasanuddin	serta perwakilan Eselon I lingkup Kemtan	akan melanjutkan kerjasama dengan <i>Ford Foundation</i> dengan program <i>Maximizing Cocoa Farm Land Asset Utilization Through Farming Business Diversifications</i> di beberapa kecamatan di Kabupaten Polman Sulbar.	melakukan kunjungan lapang ke Kabupaten Polman, Sulawesi Barat
9.	18-19 Maret 2016 Bogor, Jawa Barat	Penyusunan Draft MSP Kerja Sama antara Kemtan dengan IDH International Trade Initiative	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, BIK, serta wakil dari Ditjen Perkebunan, Biro Hukum, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian,	Secara keseluruhan, konsep MSP antara Kemtan dengan IDH masih perlu perbaikan	Pertemuan intern antara Biro KLN, Ditjen Perkebunan dan pihak IDH membahas lebih lanjut draft MSP dan rencana operasional program
10.	18 Maret 2016 Kementerian Luar Negeri	Rapat pengajuan proposal proyek dan calon anggota PSPS – CFC	Direktorat PPIH, Kemlu, Biro Kerja Sama dan Humas, Kementerian dan Kelautan, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Direktorat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bappenas, AEKI, DTI, Seditjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri dan Bapak Hiras Sidabutar, Anggota <i>Consultative Committee CFC 2015-2016</i> . Ditjen PPHP (Bidang Bilateral), wakil dari Biro Umum (Setjen), wakil dari	<p>I. Peluang pengajuan proposal proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat CFC telah menginformasikan kesempatan untuk pengajuan proposal pembiayaan proyek oleh CFC untuk komoditas perdagangan. • Tenggat waktu pengajuan proposal proyek 30 April 2016 • Terdapat 2 opsi mekanisme pembiayaan : pinjaman senilai antara USD 300 ribu – USD 1,5 juta dan <i>fast-track</i> (senilai USD 50 ribu – USD 120 ribu). • Indonesia masih kurang memanfaatkan proyek CFC: 1 proyek komoditas the (2015), 1 proyek komoditas gula (2012) dan 1 proyek komoditas <i>freshwater fish product</i> (2010). • Sebagai perbandingan beberapa Negara lain (Uganda, Tanzania dan Brazil) mendapat pendanaan untuk 3-4 proposal proyek pada tahun 2015. <p>II. Peluang keanggotaan pada PSAP</p>	<p>1. Kementerian Luar Negeri akan mengirimkan surat permintaan calon PSAP ke K/L dan Asosiasi.</p> <p>2. Kementerian Luar Negeri, akan mengadakan workshop penyusunan proposal CFC.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> • PSAP merupakan lembaga konsultatif independent dan dalam mekanisme CFC yang mempresentasikan pandangan asosiasi bisnis dan Industri, perusahaan dagang, LSM, atau Lembaga pendidikan. • Kualifikasi yang diharapkan dari lowongan 8. dimaksud adalah : <ul style="list-style-type: none"> (i) memiliki <i>leadership</i> yang diakui di tingkat nasional, regional dan internasional dalam aspek produksi, pemrosesan, perdagangan, dan pembiayaan komoditas; (ii) memiliki reputasi dalam komunitas bisnis yang sejalan dengan misi CFC; (iii) memiliki pengalaman di tingkat nasional/regional yang bermanfaat untuk cakupan global CFC; dan (iv) memiliki keahlian khusus sehingga bermanfaat untuk basis <i>broad knowledges</i> CFC. • Tenggat waktu pengajuan kandidat tanggal 6 April 2016 • Keanggotaan Indonesia pada PSAP CFC membuka kesempatan networking dalam konteks perdagangan komoditas. • Sistem pemilihan berdasarkan <i>endorsmen</i> per wilayah, untuk Indonesia masuk kelompok • Dewan Teh Indonesia (DTI) mengajukan calon Bapak Atik Dharmadi. <p>III. Persiapan sidang EB CFC ke-61</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan EB CFC akan dilaksanakan di Amsterdam, tanggal 6 April 2016 dan didahului briefing pada tanggal 5 April 2016; • Pertemuan akan membahas antara lain proposal-proposal proyek, program operasional CFC dan anggota. • Dikarenakan saat ini Indonesia belum ada 	
--	--	--	--	--	--

				<p>issue terkait CFC ataupun proposal yang akan diajukan oleh CFC karenanya posisi Indonesia hanya akan menjadi pengamat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemlu mempersilahkan kepada K/L ataupun swasta untuk mengirimkan delri untuk sidang dimaksud dan akan membantu proses pengajuan delri 	
11.	21-22 Maret 2016 Balitvet, Bogor	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan COSOP-IFAD 2016-2019	Biro KLN, Eselon 1 Kertan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, dan Biro Perencanaan.	Telah tersusun draft COSOP IFAD	Menyampaikan draft COSOP IFAD kepada Bappenas pada rapat finalisasi Wrap-up COSOP IFAD
12.	22 Maret 2016 Biro KLN Kementan	Rapat persiapan EB IFAD ke-117	Biro KLN, Bappenas, BKF Kemenkeu, BKP, Kemen PDT dan PSE-KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Matriks posisi Delri 2. Susunan Delri 	Finalisasi matriks posisi delri
13.	24 Maret 2016 Biro KLN Kementan	<i>Wrap Up Meeting</i> Finalisasi COSOP – IFAD 2016-2019	Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat BPPSDMP, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Manager SOLID – Loan 835-ID, Kementerian Pertanian; Direktorat Pinjaman dan Hibah, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan; Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Manager CCDP – Loan 880-ID, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan dari IFAD menyampaikan resume hasil pertemuan perwakilan IFAD dengan Kementerian/Lembaga terkait terhadap Discussion Paper COSOP IFAD Indonesia Tahun 2016-2019 2. Perwakilan IFAD Indonesia akan menyempurnakan Discussion Paper COSOP IFAD Indonesia dengan mengakomodir semua masukan yang telah disampaikan oleh Kementerian/Lembaga terkait 	Kementerian/Lembaga terkait diminta untuk mereview kembali Discussion Paper COSOP IFAD Indonesia 2016-2019 yang sudah direvisi setelah disirkulasi oleh IFAD.

			Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri; Eselon II lingkup Bappenas, serta <i>Country Director IFAD Indonesia</i> dan <i>COSOP Mission Team IFAD</i> .		
14.	31 Maret – 1 April 2016 BB Biogen	Rapat penyusunan bahan EB IFAD ke-117	Biro KLN, Kementerian Luar Negeri, Kemnterian PDT, Kementerian KP, Kemenkeu, BKP-Solid	Draft Matriks posisi Delri dan Intervensi berdasarkan masukan dari Kementerian PDT, Kementerian Keuangan, BKP-SOLID dan KKP	Meminta masukan dari Kementerian PDT, Kementerian Keuangan, BKP-SOLID, KBRI Roma dan KKP untuk finalisasi matriks posisi delri
BAGIAN PENGELOLAAN PHLN DAN ATANI					
1.	1 - 3 Maret 2016 Denpasar, Bali	Penyebaran Informasi Peluang Kerja Sama Luar Negeri	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Bali dan Biro KLN	1. Tim Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian diterima langsung oleh Kepala Seksi Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Bapak Mahatan pada tanggal 2 Maret 2015 dan bersamaan ada acara Bimbingan Teknik ke Petani mengenai produksi dan perbenihan di aula Dinas Pertanian Tanaman Pangan. 2. Pada kesempatan tersebut Tim menanyakan	1. Pemerintah Daerah Provinsi Bali sangat membutuhkan bantuan investasi dan kerjasama luar negeri dengan negara – negara mitra di seluruh sektor. Untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali dalam

				<p>apabila ada penawaran pertemuan/pelatihan/workshop yang dibiayai oleh negara donor dapat dimanfaatkan oleh pegawai di lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Tim juga menyampaikan 2 (dua) buah buku yaitu (1) buku Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dengan World Bank dan (2) buku Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dengan Food and Agriculture Organization (FAO).</p> <p>3. Dalam pertemuan tersebut Bapak Mahatan menyampaikan terima kasih atas informasi tawaran serta buku Dokumentasi Kerja Sama Kementerian Pertanian dengan World Bank maupun FAO.</p> <p>4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali akan memanfaatkan tawaran pertemuan/pelatihan/workshop dan lain-lain yang dilihat dari website : www.kementan.go.id c.q Pusat Kerja Sama Luar Negeri.</p>	<p>memajukan sektor pertanian, diperlukan pelatihan di luar negeri misalnya study banding, mengikuti pertemuan/pelatihan/workshop yang dibiayai oleh negara donor/mitra.</p> <p>2. Mengharapkan Kementerian Pertanian khususnya Biro Kerja Sama Luar Negeri dapat memberikan informasi tawaran pertemuan/pelatihan/workshop, dan lain-lain yang sumber pembiayaannya dari negara donor/mitra dikarenakan anggaran Pemerintah Daerah Prov. Bali saat ini tidak memungkinkan untuk mengikuti pertemuan/pelatihan/kunjungan/workshop.</p>
2.	1 Maret 2016 Hotel Santika Depok	Sosialisasi Peraturan Mentan No. 06/Permentan/KU.060/2/2016	Eselon I Lingkup Kementan dan Eselon II Lingkup Setjen	<p>1, Menteri PAN dan RB selaku Ketua Tim TRBN melalui suratnya Nomor B/342/M.PANRB/01 tanggal 16 Januari 2015 menanggapi surat Mentan tersebut dengan menugaskan Tim Evaluasi Kementerian PAN & RB untuk melakukan Evaluasi dan Verifikasi pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Kementan.</p> <p>2. Sebagai reward bagi Kementan yang telah melaksanakan sebagian program dan kegiatan Reformasi Birokrasi diberikan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden No. 134 Tahun 2015.</p> <p>3. Perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan</p>	

				<p>pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat yang bersangkutan dan/atau diberhentikan dari jabatan struktural.</p> <p>4. Perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional, penyesuaian tunjangan kinerja diberikan bagi pejabat fungsional terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan pada tahun berjalan.</p> <p>5. Pengisian Daftar Hadir antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja mengisi daftar hadir elektronik. - Pengisian daftar hadir dilakukan paling kurang 2 (dua) kali pada waktu masuk dan pulang kerja - Pengisian daftar hadir dilakukan secara manual apabila <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat dan sistem daftar hadir mengalami kerusakan/tidak berfungsi b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik c. Terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. d. Lokasi kerja dan/atau jumlah pegawai tidak efesien untuk disediakan sistem kehadiran elektronik. 	
3.	1 – 2 Maret 2016 Wisma Cikeumeuh Cimanggu Bogor	Konsolidasi dan Rekomendasi PNBK Kementan TA 2015 dan Pembahasan Draft Awal Pelaksanaan Kerja Sama PNBK	Eselon I lingkup Kementan dan Eselon II Lingkup Setjen	<p>1. Peraturan pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa penelitian dan pengembangan serta pendidikan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerjasama dengan pihak lain. - Tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bentuk kerjasama. <p>2. Biro KP Kementan dan BPPSDMP perlu ada</p>	Diharapkan masing-masing SATKER Lingkup Eselon I Kementan agar dapat menghasilkan persamaan data dan menyelesaikan Rekonsiliasi PNBK agar Laporan Keuangan Tahun 2015 dapat AUDITED.

				<p>kerjasama sesuai dengan “Prosedur Kerjasama” antara lain “ Permohonan Kerjasama, Persiapan Kerjasama, Penyelenggaraan Kerjasama dan Evaluasi Kerjasama agar tercapai mekanisme sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>3. Diharapkan tidak ada lagi temuan BPK khususnya di PNBPN, karena permasalahannya yang terjadi dalam temuan BPK adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PNBPN belum seluruhnya disetor ke Kas Negara - PNBPN yang tidak disetor ke Kas Negara. - PNBPN yang terlambat/belum setor ke Kas Negara. <p>4. Terkait dengan Laporan Keuangan di Pusat KLN, dimana permasalahan yang ada selisih antara TRPNBP (Rp. 12.242.418.389,-) dan SAIBA (Rp. 12.242.794.197,-) sejumlah selisih Rp. 375.808,-, dikarenakan pembuatan gaji dan selisihnya sudah diselesaikan.</p> <p>5. Disarankan bila ada PNBPN yang disetorkan tahun lalu atau tahun berjalan dapat diinput menggunakan Aplikasi SIMPONI.</p>	
4.	15 Maret 2016 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor	Persiapan pelaksanaan workshop Aplikasi Monev (SMART) OMK 249/2011 Tahun 2011.	Eselon I Lingkup Kementan dan Eselon II Lingkup Setjen	Integrasi SMART dan e-monev pertanian dengan sistem baru harus bisa mengakomodasikan semua sistem, koordinasi proses bisnis dengan Teknologi Informasi (TI) Single Login bisa dilakukan Update secara langsung dan aplikasi 2016 sudah bisa di pakai.	Rencana Pelaksanaan Workshop akan dilaksanakan tanggal 30 – 31 Maret 2016 di Medan,
5.	18 Maret 2016	<i>Wrap up Meeting Seventh Implementation Support Mission SMARTD (7th ISM) on Sustainable Management Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD- LOAN No. 8188-ID)</i>	World Bank SMARTD PMU (Project Management Unit) Biro Kln	➤ Pada kesempatan pertemuan dipimpin oleh, Mrs J. Ekanayake (Senior Agriculture Economist/SMARTD Task Team Project) menyampaikan perkembangan proyek yang telah dicapai dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia pada tanggal 17	SMARTD akan berusaha menyelesaikan proyek paling lambat 30 April 2016.

				<p>Desember 2015 dan <i>Kick Off Meeting Seventh Implementation</i> pada tanggal 14 Maret 2016 sebagai dasar perpanjangan proyek oleh Bank Dunia.</p> <p>➤ Adapun perkembangannya sebagaimana disampaikan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target Pengadaan yang ditargetkan minimal USD 19,5 Juta (Kontrak yang telah diselesaikan pada akhir tahun 2015 senilai USD 20,1 Juta)/ Target Terpenuhi; 2. Target Kontrak fisik minimal USD 8 Juta (Kontrak pembangunan fisik yang telah ditandatangani dan dijalankan sampai pada 8 Maret 2016 sebesar USD 4.64 Juta, dan perkiraan kontrak pembangunan fisik yang akan ditandatangani dan ditindaklanjuti paling lambat 30 April 2016 sebesar USD 3.69 Juta. Berdasarkan hal tersebut estimasi total kontrak pembagunan fisik sebesar USD 8.33 Juta (<i>taget sebagian terpenuhi</i>); 3. Merekrut konsultan Monev internasional (M&E Consultant) (Target yang telah tercapai : sedang proses rekrutmen, saat ini telah mendaftar dan menyerahkan CV sebanyak 2 orang, penawaran diperpanjang sampai 10 hari dan diharapkan dikontrak 30 April 2016)/ <i>Target sebagian tercapai</i>; 4. Harmonisasi sistem monev antara SMARTD and Balitbang (Target telah tercapai dengan dibentuknya <i>Monitoring Integrated System</i> (MIS) antara SMATRD dan Balitbang)/ target tercapai); 5. Indikator proyek komponen B berikut
--	--	--	--	--

				<p>telah tercapai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 5 laboratorium pendukung tambahan yang siap untuk diakreditasi b) Minimal 100 kolaborasi riset dan technology telah terbentuk c) 60 publikasi ilmiah yang telah direview masuk dalam <i>pipeline</i> <p>➤ berdasarkan hal tersebut, Bank Dunia memberikan tambahan waktu sampai tanggal 30 April 2016 untuk menyelesaikan <i>Key Project Indicator</i> di atas. Dengan beberapa skenario yang ditetapkan oleh pihak Bank Dunia, adapun skenarionya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak terpenuhi <i>Key Project Indicator</i> tersebut, Proyek tetap berlanjut untuk komponen A (<i>Capacity Building</i>) sampai dengan September 2017, akan tetapi komponen B hanya sampai Juni 2016. (<i>Worst Scenario</i>); 2. Jika tidak terpenuhi <i>Key Project Indicator</i> tersebut, tetap dijalankan sampai 2017 tanpa pembatalan komponen proyek, jika terpenuhi akan ditetapkan restrukturisasi dengan penambahan waktu 20 bulan (<i>Realistic Scenario</i>); 3. Jika terpenuhi akan ada reskturisasi dengan peningkatan indeks kinerja. 	
6.	21-23 Maret 2016 Wisma Cipayung, Bogor	Koordinasi tindaklanjut (Action Plan) Hasil Review LK/BMN dan Bimtek Mekanisme Pengelolaan	Eselon II lingkup Setjen	Ada dokumen yang mesti dilengkapi untuk penyempurnaan LK/BMN. Permasalahan yang dijadikan kegiatan Crash Program Sekretariat	Akan dilakukan Bimbingan dan Teknik Pengelolaan Aset BMN meliputi PMK No.

		Aset/BMN.		<p>Jenderal 2016 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentralisasi pengelolaan barang persediaan (ATK dan Komputer Supplies) 2. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN 3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN 4. Percepatan Pelaksanaan Penghapusan BMN. <p>Terdapat kesepakatan dari Satker-satker lingkup Setjen, terkait BMN yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Status Pengguna paling lambat Juni 2016 2. Melakukan Inventarisasi BMN 3. Penertiban Aset BMN di Satker masing-masing 4. Aset BMN yang telah dihentikan dari pengguna pada neraca BMN tetapi belum diproses penghapusannya agar segera dilakukan proses penghapusannya. <p>Perlu adanya pengawasan dan pengendalian (WASDAL) BMN di setiap unit kerja sesuai dengan aturan dan tujuan BMN dalam tugas dan fungsi obyek Wasdal berupa penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN di dilingkungan Satker.</p>	244/PMK.06/2012 tentang Tatacara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian BMN, PMK No. 246/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan BMN dan BMN No. 50/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Penghapusan BMN.
7.	29 Maret 2016, Ruang Rapat Lobi Lantai 1 DJPPR Kemenkeu	Rapat Pembahasan Perubahan Target Penarikan Pinjaman dan Hibah Dalam Rangka Penyusunan RAPBNP 2016	Kemenkeu, Biro KLN, Biro Perencanaan, Balitbang, BKP, BPPSDMP, Balitbang /SMARTD	1. Perwakilan dari Badan Litbang Pertanian (SMARTD) menyampaikan bahwa pada prinsipnya tidak ada perubahan target penarikan untuk tahun 2016, namun akan dilakukan percepatan kegiatan sehingga pada bulan Juli 2016 bangunan ditargetkan selesai dan akan segera dilakukan lelang peralatan. Perlu diinformasikan bahwa akreditasi bisa dicabut apabila tidak ada peralatan yang mendukung.	Kementerian Keuangan menyampaikan agar Kementerian Pertanian segera mengajukan secara resmi perubahan secara detail yang diusulkan, melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

				<p>2. Perwakilan dari Badan Ketahanan Pangan (SOLID) menyampaikan bahwa pada kegiatan SOLID terdapat masalah penghentian sementara pencairan dana sejak Januari 2016 dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sejak tanggal 22 Februari 2016 yang menurut penjelasan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara dikarenakan dana yang telah digunakan belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan dengan pengajuan <i>Withdrawal Application (WA)</i> sehingga berdampak pada penghentian pencairan Rupiah Murni Pendamping (RMP)</p> <p>3. Perwakilan dari Badan SDM Pertanian menyampaikan bahwa sementara tidak ada perubahan target penarikan, namun akan dilakukan koordinasi dan penghitungan kembali terkait dengan kegiatan persiapan yang dilakukan di Pusat pada pelaksanaan proyek pinjaman IFAD "<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation</i>" (IPDMIP) dan akan disampaikan sebelum tanggal 4 April 2016. Namun mengingat kegiatan ini terdapat dua sumber pendanaan pinjaman, yaitu ADB (komponen Kementerian PUPERA) dan IFAD, dan sesuai informasi dari Kementerian Keuangan bahwa negosiasi dengan pihak ADB baru akan dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli 2016</p> <p>Terkait dengan proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian : <i>Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase 2/WISMP2</i>, dan <i>Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)</i> menurut informasi dari Kementerian Keuangan, Ditjen PSP mengajukan usulan untuk dilakukan <i>drop loan</i></p>	
--	--	--	--	---	--

8.	1-31 Maret 2016 Biro KLN Kementan	Penugasan pejabat/pegawai Kementerian Pertanian ke Luar Negeri	Sek Neg RI, Kemenlu, Kedutaan Besar Negara Terkait dan Eselon I Lingkup Kementan	Telah diproses penugas pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 74 orang yaitu mengikuti workshop/seminar sebanyak 5 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 37 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 15 orang, melakukan kunjungan sebanyak 16 orang dan program S2 sebanyak 1 orang.	Berkas/dokumen perjalanan pejabat /pegawai yang bersangkutan telah dikirim ke Sekretariat Negara RI untuk memperoleh Surat Persetujuan Setneg RI dan Kementerian Luar Negeri RI untuk memperoleh exit permit serta Kedutaan Besar terkait untuk memperoleh visa.